

**PENGARUH TEMUAN AUDIT, PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DI
WEBSITE DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

ENDANG SUHARTI



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**PENGARUH TEMUAN AUDIT, PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DI
WEBSITE DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

Oleh
ENDANG SUHARTI

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada
Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRACT

The Influence of Audit Findings, Disclosure of Financial Information on the Website and Characteristics of Local Governments on the Performance of Local Government Governance in Indonesia

By
EndangSuharti

This study aims to provide empirical evidence on the influence of audit findings (weakness of internal control system, non-compliance with statutory regulations and follow-up on audit), disclosure of financial information on the website, and characteristics of local government (level of regional wealth, and realization of regional capital expenditure) on the performance of local government governance. The performance of local government governance is measured by performance evaluation score of local government governance (EKPPD) whose source of information is derived from the report of local government governance (LPPD). The sample in this study as much 147 local government in Indonesia in 2014. Hypothesis testing is done by using multiple regression with the help of program Eviews 8. Result of research indicate weakness of internal control system and follow up on audit has an influence on the performance of local government governance. The realization of regional capital expenditure in accordance with the results of research has an significant influence on the performance of local government governance, but does not support the hypothesis. While non-compliance with statutory regulations, disclosure of financial information on the website and level of regional wealth, not significant influence to the performance of local government governance in Indonesia.

Keywords: audit findings, disclosure of financial information on the website, characteristics of local government, Performance Evaluation of Local Government Governance (EKPPD), Local Government GovernanceReport (LPPD).

ABSTRAK

Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Oleh
EndangSuharti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh temuan audit (kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas rekomendasi audit), pengungkapan informasi keuangan di *website* dan karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan daerah, dan realisasi belanja modal daerah) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang sumber informasi utamanya berasal dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 147 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan program *Eviews 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut atas rekomendasi audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Realisasi belanja modal daerah menurut hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tidak mendukung hipotesis. Sementara ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengungkapan informasi keuangan di *website* dan tingkat kekayaan daerah, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata kunci: temuan audit, pengungkapan informasi keuangan di *website*, karakteristik pemerintah daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Judul Tesis : **PENGARUH TEMUAN AUDIT, PENGUNGKAPAN
INFORMASI KEUANGAN DI *WEBSITE* DAN
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Endang Suharti**

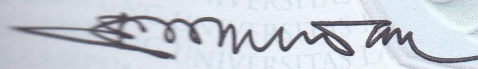
No. Pokok Mahasiswa : 1421031021

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Emde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**
NIP 19560620 198603 1 003 NIP 19700817 199703 2 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199501 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Eide Evana, S.E., M.Si, Akt., CA., CPA.

Sekretaris : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 05 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia" merupakan karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan dengan cara yang sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku di kalangan akademik.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Pembuat Pernyataan,



Endang Suharti
NPM 1421031021

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa bahagia dan syukur kupersembahkan Tesis ini untuk:

Orang Tuaku tersayang Haryoto dan Sukinah Ismail

Suamiku tercinta Ude Sujana, AK, CA

Anakku M. Rafif Fakhri Sujana, Syarif Umar Hamdan Sujana, dan

Ammar Zacky Alghani Sujana

Almamaterku Universitas Lampung

RIWAYAT HIDUP

1. Data Umum

- Nama : ENDANG SUHARTI
- Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 28 Agustus 1976
- Agama : Islam
- Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Alamat : JL. Wolter Monginsidi Gang H.M. Nurdin, Perumahan Mong Residence Blok C No. 7, Kel. Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.
- Telepon : 081380174800
- Email : endangsuharti76@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- Sekolah Dasar : SD Indriyasana Palembang, lulus tahun 1989
- SMP : SMP Xaverius I Palembang, lulus tahun 1992
- SMA : SMA Negeri 18 Surabaya, lulus tahun 1995
- Diploma : Diploma III STAN Jakarta, lulus tahun 1998
- : Diploma IV STAN Jakarta, lulus tahun 2008

3. Riwayat Pekerjaan

- Auditor Trampil : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (1999-2002)
- : Perwakilan BPKP DKI Jakarta II (2002-2004)
- : Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2004-2006)
- : Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Jakarta (2006-2008)
- Auditor Ahli Pertama : Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2008-2011)
- Auditor Ahli Muda : Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2011-2014)
- : Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Jakarta (2014-sekarang)

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.
(Al Quran Surat Al Insyirah: 5)

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul "Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis, namun berkat adanya bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak maka Tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung, atas perhatian dan bantuannya kepada penulis sehingga tesis ini bisa selesai tepat waktu;
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA, CPA., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, perhatian, kesabaran dan semangat serta waktu yang telah diberikan selama penyusunan tesis ini;

5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran telah memberikan perhatian, semangat, saran, motivasi dan waktunya yang luar biasa selama penyusunan tesis;
6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan dengan penuh kesabaran dan perhatian serta atas pembelajaran yang berharga bagi penulis selama penyusunan tesis;
7. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas dan Penguji Pendamping yang juga telah memberikan saran dan masukan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada penulis selama penyusunan tesis;
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Magister Ilmu Akuntansi yang selama masa perkuliahan telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;
9. Alm. Papa-ku tercinta(Haryoto) yang selalu kukenang atas kasih sayang, perhatian, doa, nasihat, bimbingan, arahan dan kepercayaan dan perjuangan semasa hidup beliau;
10. Alm. Mama-ku tercinta (Sukinah Ismail) yang selalu kukenang atas kasih sayang, perhatian, doa dan keikhlasannya berkorban demi anak-anaknya walau dalam keadaan sakit serta kesetiiaannya menemani penulis di setiap momen kehidupan penulis;
11. Kedua mertuaku tersayang Abah Endin dan Emih Iyoy yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dan perhatian kepada penulis;
12. Suamiku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan moril dan materiil kepada penulis serta menemani dalam penyelesaian studi;
13. Anak-anakku tersayang M. Rafif, Hamdan dan Zacky yang selalu mendoakan serta menemani penulis selama dalam penyelesaian tesis ini. Juga keponakan-keponakanku tersayang Aliffa, Abin dan Caca atas doa dan perhatian kepada penulis;
14. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ibu Sally Salamah beserta jajaranya yang telah membantu proses penyelesaian tesis;
15. Pengelola STAR BPKP Pusat dan Satgas STAR BPKP Perwakilan Provinsi Lampung atas beasiswa dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar dengan lancar dan tepat waktu.

16. Pengelola dan karyawan serta karyawan Program Magister Ilmu Akuntansi, Mas Muhayin, Mas Andri, Mbak Lenny, dkk yang telah ikut memberikan semangat dan membantu kelancaran perkuliahan dan penyelesaian tesis ini;
17. Teman seperjuanganku dalam 3 DIVA, Wahdani dan Nurul atas doa dan semangat yang diberikan, kekompakan dan kesetiaan berbagi suka dan duka dalam menemani penulis selama penyelesaian tesis;
18. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I: Dewi, Dwi, Fadri, Wahdani, Nurul, Acep, Sidiq, Firda, Sukani, Zai, Reny, Mega, Sadu, Juwe, Anifa, Ovi, Lilis, Windy, Feria, Nani, Desi, Heni, May, Ida dan Bernadeta atas doa dan semangat, bantuan serta kekompakan selama perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah dan Ridho-Nya kepada kita semua... Aamiin... Aamiin.. Aamiin.. ya Rabbal'alamiin...

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Endang Suharti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 RumusanMasalah	11
1.3 TujuanPenelitian	12
1.4ManfaatPenelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
2.1 LandasanTeori.....	14
2.1.1 TeoriKeagenan	14
2.1.2 AkuntabilitasdanTransparansi	17
2.1.3 KinerjaPenyelenggaraanPemerintahanDaerah	19
2.2PengembanganHipotesis	22
2.2.1Temuan Audit danKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah	22
2.2.1.1KelemahanSistemPegendalianIntern	23
2.2.1.2KetidakpatuhanterhadapKetentuanPeraturanPerundang-undangan	25
2.2.1.3 TindakLanjutRekomendasiatasTemuanAudit	26
2.2.2 PengungkapanInformasiKeuangan di WebsitedanKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah.....	28
2.2.3KarakteristikPemerintah Daerah danKinerjaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah	30
2.2.3.1Tingkat KekayaanDaerah	30
2.2.3.2RealisasiBelanja Modal Daerah	31
2.3 Model Penelitian	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 PopulasidanSampel	34
3.2 Data Penelitian	34
3.3 DefinisiVariabel	35
3.3.1 VariabelDependen	35
3.3.2.VariabelIndependen	36
3.3.2.1 KelemahanSistemPengendalian Intern Pemerintah Daerah	37
3.3.2.2 KetidakpatuhanTerhadapketentuanPeraturanPerundang-	
undangan	37
3.3.2.3 TindakLanjutatasRekomendasi Audit	38
3.3.2.4 PengungkapanInformasiKeuangan di Website	39
3.3.2.5 Tingkat Kekayaan Daerah	40
3.3.2.6 RealisasiBelanja Modal Daerah	40
3.4 AlatdanMetodeAnalisis	41
3.4.1 UjiStatistikdeskriptif	41
3.4.2 UjiAsumsiKlasik	42
3.4.2.1 UjiNormalitas	42
3.4.2.2 UjiMultikolinearitas	42
3.4.2.3 UjiHeterokedastisitas	43
3.4.2.4 UjiAutokorelasi	44
3.4.3 Uji Model	45
3.4.3.1 UjiKoefisienDeterminasi (<i>R-Square</i>)	45
3.4.3.2 UjiKoefisienRegresi (Uji <i>t</i>)	46
3.4.3.3 UjiSignifikansiSimultan (Uji <i>F</i>)	46
3.5 Model Ekonometrika	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
4.1 DeskripsiSampelPenelitian	48
4.2 StatistikDeskriptifVariabel	49
4.2.1 StatistikDeskriptifVariabelDependen	50
4.2.2 StatistikDeskriptifVariabelIndependen	51
4.2.2.1 KelemahanSistemPengendalian Intern (KSPI)	51
4.2.2.2 KetidakpatuhanterhadapKetentuanPeraturanPerundang-	
undangan (KKPPU)	52
4.2.2.3 TindakLanjutRekomendasiatasTemuan Audit (TLRA) ...	53
4.2.2.4 PengungkapanInformasiKeuangan di <i>Website</i> (PIKW)	53
4.2.2.5 Tingkat Kekayaan Daerah (TKD)	55
4.2.2.6 RealisasiBelanja Modal Daerah (RBMD)	55
4.3 PengujianAsumsiKlasik	56
4.3.1 UjiNormalitas	56
4.3.2 UjiMultikolinearitas	58
4.3.3 UjiHeteroskedastisitas	59
4.3.4 UjiAutokorelasi	59

4.4 Pengujian model Regresi	60
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)	63
4.4.2 Uji koefisien Regresi (Uji t)	64
4.4.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)	66
4.5 Hasil pengujian dan Pembahasan Hipotesis	67
4.5.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	68
4.5.2 Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	70
4.5.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit	71
4.5.4 Pengungkapan Informasi Keuangan di <i>Website</i>	72
4.5.5 Tingkat Kekayaan Daerah	73
4.5.6 Realisasi Belanja Modal Daerah	74
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 77
5.1 Simpulan	77
5.2 Keterbatasan Penelitian	78
5.3 Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Output Program Eviews 8	85
Lampiran 2 Data Skor EKPPD.....	90
Lampiran 3 Data Hasil Audit BPK.....	92
Lampiran 4 PengungkapanInformasiKeuangan di Website.....	95
Lampiran 5 Data PendapatandanBelanjaPemerintah Daerah.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Range Skorindeks EKPPD.....	36
Tabel 3.2 IndeksPengungkapan.....	39
Tabel 4.1 PenentuanSampelPenelitian	49
Tabel 4.2 StatistikDeskriptifVariabelDependen	50
Tabel 4.3 RekapitilasiPengungkapanInformasiKeuangan di Website Pemerintah Daerah MenurutJumlahInformasi	54
Tabel 4.4 Tabel Durbin-Watson dengantingkatSignifikan 5%	60
Tabel 4.5 HasilUjiStatistik t	65

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Grafik 1.1 Hasil EKPPD Tahun 2011-2014	4
Gambar 2.1 KerangkaPemikiran.....	33
Gambar 4.1 HasilPengujianNormalitas Model.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

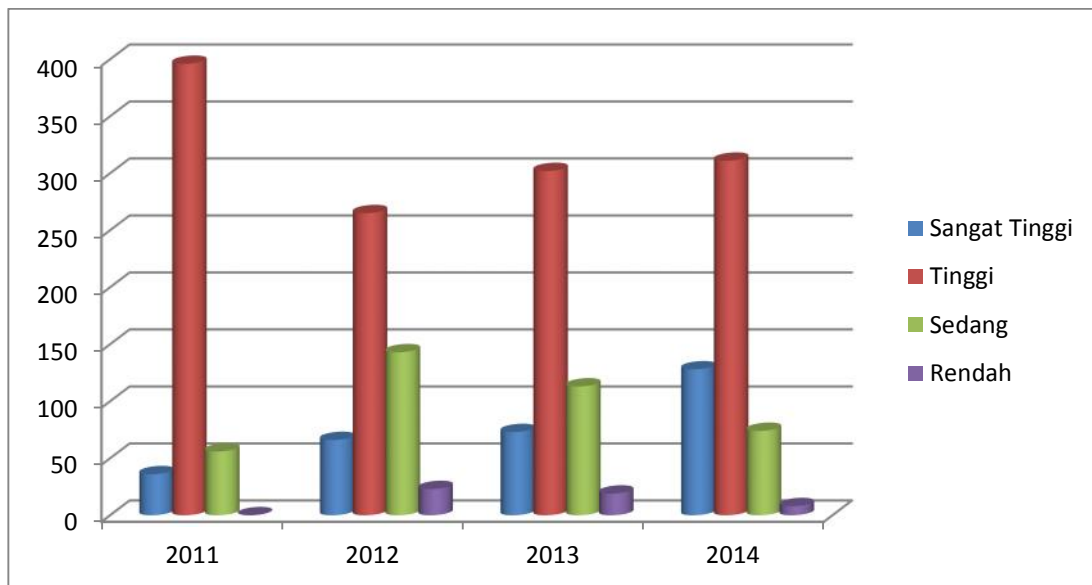
Pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan telah mengalami perubahan yang disebabkan adanya dorongan reformasi birokrasi. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah pun dilakukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya *good public governance* (KNKG, 2010). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan serta memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan akan kinerja pemerintah daerah yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan daerah seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya harus dilakukan melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan untuk dapat meminimalkan adanya konflik antara pemerintah daerah dan rakyat. Isu tentang kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Pemerintah Pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Selain itu, EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Manual Tata Cara EKPPD tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa hasil EKPPD digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan, penghapusan / penggabungan daerah otonom. Nilai hasil EKPPD merupakan cerminan dari tingkat kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil EKPPD tahun 2011-2014 terhadap

pemerintah daerah di Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah mendapatkan penilaian dengan prestasi yang tinggi yang menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dinilai telah mencapai standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan penilaian kinerja dengan prestasi sedang dan rendah seperti terlihat dalam grafik 1.1, menunjukkan masih terdapat pemerintah daerah yang dinilai belum dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah dengan baik dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Grafik 1.1 Hasil EKKPD tahun 2011-2014



Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) suatu pemerintah daerah sehingga terhadap LPPD tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Terbitnya paket undang-undang pada bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menandai reformasi pada bidang pengelolaan keuangan negara dengan adanya perubahan fundamental diantaranya adalah reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan negara dan audit. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK-RI bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Dapat dikatakan tugas dari lembaga ini sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan negara setiap tahun anggaran demi mewujudkan cita-cita bernegara. Auditor eksternal (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan

pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat melalui pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari opini yang diberikan auditor eksternal (BPK) atas penyajian LKPD.

Capaian LKPD pada tahun 2013 masih di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas seluruh LKPD. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK dan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi audit. Menurut Dwiputrianti (2008) tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya *continuous improvement* atas kinerja entitas yang diperiksa. Selain itu, manfaat dari suatu pemeriksaan yaitu untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara hanya dapat dirasakan, apabila rekomendasi atas temuan hasil audit ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan (entitas yang diperiksa). Tanpa penyelesaian tindak lanjut dari entitas yang diperiksa, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas

penyelenggaraan keuangan negara hanya akan menjadi mimpi belaka sehingga tata kelola pemerintah yang baik pun tidak dapat tercapai.

Fenomena munculnya iklan atau karangan bunga yang berisi ucapan selamat kepada pemerintah daerah atas opini WTP yang diperoleh dari BPK terkesan dilakukan agar predikat yang tampak membanggakan itu harus diketahui oleh masyarakat. Bagi masyarakat pemberian predikat WTP tersebut menjadi citra positif yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara akuntabel dan bebas dari korupsi. Opini WTP dari BPK juga menjadi kebanggaan dan prestasi yang harus dikejar dan didapatkan pemerintah daerah demi mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut wajar saja jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika dilakukan dengan cara yang tidak terpuji seperti yang belakangan ini menjadi pemberitaan di media massa dan elektronik adanya oknum kementerian yang menyuap auditor BPK demi mendapatkan opini WTP bagi kementeriannya seperti diberitakan dalam laman mediaindonesia.com, maka usaha mendapatkan opini WTP tersebut justru menjadikan kementerian tersebut mendapat citra negatif. Demikian pula dengan pemerintah daerah, maka tidaklah mengherankan jika terdapat beberapa pemerintah daerah yang walaupun telah mendapat predikat WTP dari BPK, namun masih ada oknum pejabatnya yang

tertangkap karena melakukan korupsi. Permasalahan bagi pemerintah daerah yang belum mendapat opini WTP, antara lain: permasalahan pengelolaan keuangan dan aset yang belum akuntabel baik dari sistem pengendalian intern maupun dari ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi temuan audit BPK selama bertahun-tahun, dan permasalahan rekomendasi dari auditor yang tidak mengarah pada perbaikan sistem tetapi lebih kepada keberhasilan menemukan kerugian negara/daerah padahal kesalahan fundamental dapat diperbaiki dengan adanya perbaikan sistem sehingga audit yang dilakukanpun dapat memantau rekomendasi yang diberikan apakah sistemnya sudah diperbaiki atau belum (Gutomo, 2015).

Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Public Governance (GPG)*, selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya *GPG* (KNKG, 2010). Dengan demikian disebutkan bahwa salah satu langkah untuk mewujudkan *GPG*, pemerintah daerah harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah

merupakan salah satu informasi pelengkap dalam melaksanakan EKPPD.

Selanjutnya, UU KIP menyatakan bahwa informasi publik hendaknya disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Martani et al. 2013). Styles dan Tennyson (2007) dalam Martani et al. (2013), mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling *cost effective* bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Moon (2002) juga menyatakan penggunaan *website* dan teknologi informasi ini juga merupakan aplikasi dari penerapan *e-government* yang akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa yang akan datang. Martani et al. (2013) menyebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terhadap *website* pemerintah daerah diantaranya: Hermana et al. (2012) melakukan penelitian terhadap 424 *website* pemerintah daerah di bulan Juni 2011 menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah hanya mencapai 19%. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pengungkapan informasi keuangan di *website* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu informasi pelengkap EKPPD yaitu informasi keuangan daerah. Dalam keuangan daerah terdapat informasi yang mencerminkan karakteristik daerah tersebut, antara lain ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah belanja daerah. Semakin besar kemampuan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki dan diharapkan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pun semakin baik. (Sedyaningsih dan Zaky, 2015). Penelitian yang terkait tentang karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK RI dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) mengenai pengaruh karakteristik daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian tersebut yaitu, tingkat kekayaan daerah, dan realisasi belanja modal daerah serta temuan audit BPK berupa kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu penelitian yang terkait dengan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengacu pada penelitian Arifianti et al. (2013) mengenai pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel temuan audit BPK berupa kelemahan sistem pengendalian intern; ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit.

Sedangkan penelitian terkait pengungkapan informasi keuangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Sari et al. (2015) mengenai Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini variabel pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1.2.1 Apakah kelemahan sistem pengendalian intern mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.2.2 Apakah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?

- 1.2.3 Apakah tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- 1.2.4 Apakah pengungkapan informasi keuangan di *website* mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- 1.2.5 Apakah tingkat kekayaan daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- 1.2.6 Apakah realisasi belanja modal daerah mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris adanya:

- 1.3.1 Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.3.2 Pengaruh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.3.3 Pengaruh tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.3.4 Pengaruh pengungkapan informasi keuangan di *website* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.3.5 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.6 Pengaruh realisasi belanja modal daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.4.2 Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di sektor publik.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara satu orang atau lebih, yang disebut sebagai prinsipal atau pemilik, dengan orang lain, yang disebut dengan agen, dalam sebuah kontrak untuk melakukan jasa atas nama prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu hubungan antara pemilik dengan manajemen (agen), dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Zimmerman (1977) dalam Sari et al. (2015), mengungkapkan masalah keagenan dapat terjadi dalam organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, rakyat bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada agen baik itu legislatif maupun eksekutif (pemerintah) dalam mengelola urusan publik.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan rakyat sehingga menimbulkan asimetri informasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya untuk mengurangi asimetri informasi (Agusti, 2014).

Mardiasmo (2002) menjelaskan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan oleh pemerintah daerah berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi sumber keuangan daerah sendiri), maupun secara tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan mereka sendiri dan masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai

mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi asimetri informasi (Setiawan, 2012).

Berdasar teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan baik dan kepatuhan kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, maka informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang berarti asimetri informasi yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya asimetri informasi maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012). Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

2.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Mahsun (2006) dalam Sudarsana (2013), Akuntabilitas dalam arti luas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen/pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal/masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan inti filosofis dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi. Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun

(2006) dalam Sudarsana (2013)). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrasjid, 2008). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 diterbitkan untuk mewujudkan transparansi seperti ditegaskan dalam pasal 2 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan pasal 9 bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Evan dan Patton (1987) dalam Arifin dan Fitriasisari (2014) mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Sinyal yang

baik bertujuan agar rakyat dapat mendukung pemerintahan yang sedang berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah akan memberikan sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lengkap. Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara wajib diungkapkan sehingga dapat memenuhi keinginan rakyat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi (Setyaningrum, 2015).

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara wajib diungkapkan sehingga dapat memenuhi keinginan rakyat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi (Setyaningrum, 2015). Bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, kinerja

merupakan hasil/keluaran dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2009, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sinyal informasi yang diungkapkan oleh pemerintah. Selain itu kinerja pemerintah yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik (Hilmi dan Martani, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). EKPPD dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan dan mengelola hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Adapun tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja

untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, *self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun

rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Temuan Audit dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK sesuai dengan fungsinya berwenang untuk memeriksa, menguji, dan menilai kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan temuan audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Penelitian mengenai hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Arifianti et al. (2013), Sari et al. (2015) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil pemeriksaan BPK. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

2.2.1.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Sarita (2012) dalam Atmaja dan Probohudono (2015) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan revidi pada seluruh tahapan. Kasus kelemahan sistem pengendalian intern umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Arifianti et al., 2013). Sarita (2012) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja. Ramadei (2009) dalam Arifianti et al. (2013) menyebutkan pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka semakin meningkat pula kinerjanya. Penelitian Shodiq (2001) serta Boritz dan Jee (2007) dalam Arifianti et al. (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya dukungan terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan.

Dengan masih adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern dalam LKPD, maka pemerintah daerah seharusnya semakin berhati-hati dalam pelaksanaan sistem

pengendalian intern tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Sehingga melalui sebuah pengendalian intern yang baik akan meminimalkan tindak kecurangan yang berpotensi kerugian negara. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.1.2 Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian Liu dan Lin (2012) dalam Sari et al. (2015) menemukan semakin banyak pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Cina menyebabkan tingkat korupsi menjadi meningkat sehingga kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Beberapa penelitian terdahulu dalam Arifianti et al. (2013) diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008) menjelaskan bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Kepatuhan yang baik

yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Vago, 2008). Penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan Audit

Widiatmoko (2012) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan

dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, temuan hasil audit sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan hasil audit tidak terjadi secara berulang-ulang baik itu kesalahan, penyelewengan, maupun pemborosan dengan adanya rekomendasi dari auditor. Perbaikan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka temuan hasil audit dapat bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas. Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya *continuous improvement* atas kinerja entitas yang diperiksa. Bagi lembaga pemeriksaan, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi belaka (Dwiputrianti, 2008).

Rekomendasi atau saran perbaikan harus dilakukan pemerintah daerah supaya menghilangkan penyebab hakiki terjadinya permasalahan dimaksud sehingga

permasalahan yang sama tidak terjadi kembali pada tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian Masyitoh (2014) dalam penelitian Sari et al. (2015) menunjukkan bahwa semakin besar tindaklanjut pemeriksaan yang dilakukan pemerintah akan menurunkan persepsi korupsi. Dengan demikian semakin tinggi tingkat penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi temuan audit akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Pemda. Dalam penelitian Dwiputrianti (2011), tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Hartono (2006) dalam Arifianti et al. (2013) menyatakan dengan memasukan faktor penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian kinerja manajemen, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan

ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan. Selain akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Beberapa penelitian mengenai tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* antara lain: Laswad (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan sukarela pada *website* resmi dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012). Penelitian ini menemukan bahwa PAD, DAK, DAU, dan ukuran Pemda mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada *website* resmi Pemda. Martani et al. (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan signifikan pada *website* resmi pemerintah daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menempatkan pengungkapan informasi keuangan di *website* sebagai variabel dependen. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba menempatkan

pengungkapan informasi keuangan di *website* sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengungkapan informasi keuangan di *website* berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah daerah

Karakteristik daerah dalam penelitian ini yang sesuai untuk menggambarkan kondisi keuangan pada Pemerintah Daerah mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang digambarkan dengan tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal sebagai berikut:

2.2.3.1 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang diproksikan dengan PAD yang diperoleh. Beberapa penelitian dalam Mustikarini dan Fitriyasi (2012) diantaranya: Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di

suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Penelitian Lin et al. (2010) yang menemukan bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Cina. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.3.2 Realisasi Belanja Modal Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah mewujudkan hal tersebut dalam bentuk pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang layak, dan pengembangan sistem jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga peningkatan belanja pemerintah daerah seharusnya meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012). Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. untuk melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur, dan tidak bisa dipungkiri bahwa belanja modal sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu daerah.

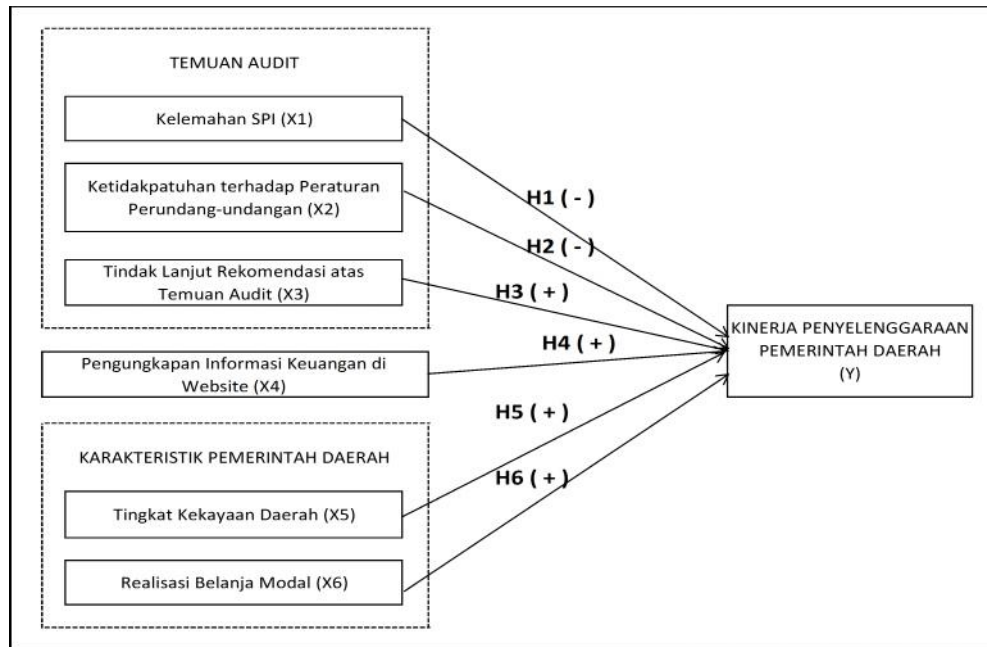
Beberapa penelitian dalam Mustikarini dan Fitriyasi (2012) diantaranya: penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan penelitian Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga dengan penelitian Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H6: Realisasi belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka penelitian berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang mendapatkan skor indeks EKPPD atas LPPD tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800-35 tahun 2016,
2. Pemerintah daerah yang LKPD tahun 2013-nya telah diaudit oleh BPK-RI, dan
3. Pemerintah daerah yang memiliki *website* resmi yang dapat diakses dan menyajikan minimal 1 dokumen transparansi pengelolaan anggaran daerah tahun 2014 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1/1797/SJ/2012.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung atau melalui media perantara. Sumber data skor indeks EKKPD diperoleh sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

800-35 tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Jumlah temuan audit dan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan semester 2 tahun 2014 dari *website* resmi BPK-RI. Data tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Laporan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014. Data pengungkapan informasi keuangan di *website* resmi pemerintah daerah diperoleh dengan cara mengamati langsung pada *website* resmi pemerintah daerah yang bersangkutan.

3.3 Definisi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain baik secara positif maupun secara negatif dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800-35 tahun 2016. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah didapat dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2014 dengan range skor indeks 0 sampai dengan 4. Berdasarkan Manual Tata Cara EKKPD Tahun 2016, pemeringkatan skor indeks EKKPD pemerintah provinsi, kabupaten dan kota secara nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Range skor indeks EKKPD

No.	Indeks EKKPD	Prestasi
1	$3,00 < \dots \leq 4,00$	Sangat Tinggi
2	$2,00 < \dots \leq 3,00$	Tinggi
3	$1,00 < \dots \leq 2,00$	Sedang
4	$0,00 < \dots \leq 1,00$	Rendah

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini seperti yang digunakan pada penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Arifianti et al. (2013) dan Sari et al. (2015), yaitu hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas rekomendasi audit, karakteristik pemerintah daerah berupa tingkat kekayaan daerah

dan realisasi belanja modal daerah, dan variabel pengungkapan informasi keuangan di *website*.

3.3.2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern diukur dengan jumlah temuan audit yang disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern atas pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2013 yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan Semester 2 tahun 2014 dari *website* resmi BPK-RI. Jumlah temuan tersebut adalah jumlah total temuan kelemahan sistem pengendalian intern dari tiga kategori kelemahan sistem pengendalian intern yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan KSPI di dalam persamaan.

3.3.2.2 Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Variabel independen ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jumlah temuan audit yang disebabkan oleh ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2013 yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan Semester 2 tahun 2014 dari *website* resmi BPK-RI. Jumlah temuan tersebut adalah jumlah total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari tujuh kategori temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu temuan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian daerah, temuan potensi kerugian daerah, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, temuan mengenai ketidakefisienan, serta temuan mengenai ketidakefektifan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan KKPPU dalam persamaan.

3.3.2.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit

Variabel independen tindak lanjut atas rekomendasi audit diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditemukan oleh auditor BPK (temuan hasil audit) yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 dan Semester 2 tahun 2014 dari *website* resmi BPK-RI. Jumlah tindak lanjut tersebut adalah jumlah tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK atas LKPD. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan TLRA dalam persamaan.

3.3.2.4 Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website*

Variabel ini diukur berdasarkan *scoring* jumlah item pengungkapan informasi keuangan di *website* sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. Setelah *score* didapatkan, maka akan dibagi dengan nilai maksimal jumlah item informasi keuangan yang harus diungkapkan dalam *website* yaitu 12. Selanjutnya *scoring* ini akan memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan PIKW dalam persamaan.

Tabel 3.2 Indeks Pengungkapan

No	Informasi yang Tercantum	Scoring
1	Ringkasan RKA SKPD	1
2	Ringkasan RKA PPKD	1
3	Rancangan Perda APBD	1
4	Rancangan Perda Perubahan APBD	1
5	Perda APBD	1
6	Perda Perubahan APBD	1
7	Ringkasan DPA SKPD	1
8	Ringkasan DPA PPKD	1
9	LRA SKPD	1
10	LRA PPKD	1
11	LKPD yang Telah Diaudit	1
12	Opini BPK atas LKPD	1
Jumlah		12

Sumber: Diolah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/ SJ/2012

3.3.2.5 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, semakin tinggi tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tupoksinya. PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari daerah tersebut (Suhardjanto et al. 2010). Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriasari (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Maka pada penelitian ini variabel independen tingkat kekayaan daerah diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan TKD dalam persamaan.

3.3.2.6 Realisasi Belanja Modal Daerah

Belanja modal merupakan jenis belanja daerah yang dapat berdampak menggerakkan roda perekonomian suatu daerah, tingginya rasio realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja daerah mencerminkan semakin dinamisnya perekonomian suatu daerah. Penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015), belanja daerah diukur menggunakan realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja. Maka pada penelitian ini variabel independen realisasi belanja modal daerah diukur dengan

jumlah realisasi belanja modal daerah dibandingkan dengan jumlah total realisasi belanja daerah yang diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan RBMD dalam persamaan.

3.4 Alat dan Metode Analisis

Alat uji yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Pengujian analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Beberapa langkah dan alat analisis diperlukan dalam melakukan analisis regresi berganda.. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan *software Eviews 8* untuk mempermudah dalam menganalisis data.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini, yang memberikan gambaran secara umum mengenai data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Ghazali (2005) menyebutkan bahwa alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

ringkas dan sederhana yang akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara uji normalitas untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali dan Ratmono, 2013). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan pengujian statistik dengan uji *Jarque – Bera (JB)*. Dasar pengambilan keputusan pengujian statistik dengan uji *Jarque – Bera (JB)* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan *Jarque – Bera (JB)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai signifikan *Jarque – Bera (JB)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

Selain itu untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, penelitian ini juga menggunakan matriks korelasi. Apabila korelasi antar variabel bebas tidak lebih dari 0,90 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali dan Ratmono, 2013).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali dan Ratmono, 2013). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji statistik. Uji statistik dilakukan adalah dengan menggunakan Uji *White*. Uji *White* dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan

variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian antarvariabel independen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis H_0 : tidak ada heteroskedastisitas dan H_a : ada heteroskedastisitas. Kriteria ujinya adalah jika $Obs * R-square > \chi^2$ atau $p-value < \alpha$, maka H_0 yang menyatakan adanya homoskedastisitas ditolak.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW test). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah d_L dan batas atas d_U . H_0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
2. Jika $0 < d < d_L$, maka tidak ada autokorelasi positif.
3. Jika $d_L < d < d_U$, maka tidak ada autokorelasi positif.
4. Jika $4 - d_L < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif.
5. Jika $4 - d_U < d < 4 - d_L$, maka tidak ada korelasi negatif.

3.4.3 Uji Model

Uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam mekasir nilai actual secara statistic (Ghozali dan Ratmono, 2013). Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini mengikuti distribusi F yang kriterianya seperti *One Way Anova*. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/*error* (α) sebesar 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

3.4.3.1 Uji koefisien determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.3.2 Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Uji statistik F dilakukan dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Jika F hitung $>$ F-tabel $(n-k-1)$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5 Model Ekonometrika

Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan formula sebagai berikut:

$$KPPD_i = \alpha + \beta_1 KSPI_i - \beta_2 KKPPU_i + \beta_3 TLRA_i + \beta_4 PIKW_i + \beta_5 TKD_i + \beta_6 RBM_i + \epsilon_i$$

Dimana:

$KPPD_i$: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i

$KSPI_i$: Kelemahan SPI pemerintah daerah i

$KKPPU_i$: Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah i

$TLRA_i$: Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit pada pemerintah daerah i

$PIKW_i$: Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* pemerintah daerah i

TKD_i : Tingkat Kekayaan Daerah pemerintah daerah i

RBM_i : Realisasi Belanja Modal pemerintah daerah i

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi

ϵ_i : *Standard error*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut atas rekomendasi audit, pengungkapan informasi keuangan di website, tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pengujian terhadap enam variabel independen dapat disimpulkan bahwa terdapat dua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu temuan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengungkapan informasi keuangan di *website*, tingkat kekayaan daerah dan realisasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa hasil temuan audit BPK-RI berupa temuan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut atas rekomendasi audit memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini membuktikan

bahwa pengelolaan pemerintahan daerah dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK oleh pemerintah daerah menunjukkan pemerintah daerah bertanggung jawab dan menjadikan hasil temuan audit BPK sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengamatan *website* pemerintah daerah sebagai salah satu kriteria dalam menentukan sampel penelitian, dimana pada saat pengamatan peneliti menemukan banyak *website* pemerintah daerah yang tidak dapat diakses karena *website* tersebut dibekukan, tidak aktif atau dibajak. Hal ini membuat sampel penelitian berkurang dan pengambilan kesimpulan bisa menjadi bias karena mungkin *website* pemerintah daerah tersebut menyajikan informasi keuangan, namun karena tidak dapat diakses maka dianggap pemerintah daerah tersebut tidak menyajikan informasi keuangan di *website*-nya.

5.3 Saran

Penelitian ini menggunakan data sekunder, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer selain data sekunder yang dapat dilakukan dengan kuesioner untuk memperkuat analisis mengenai pelayanan umum pemerintah daerah yang menjadi fokus evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain

itu penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, yaitu masih terdapat pemerintah daerah yang belum memiliki *website* dan belum meng-*update* serta memperbaiki *website*-nya sehingga *website*-nya tidak dapat diakses, masih terdapat pemerintah daerah yang belum menyajikan seluruh item dokumen transparansi anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah daerah di Indonesia yang belum melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 2012 dengan baik dan lengkap, agar segera membuat, memperbaiki, meng-*update* dan melengkapi *website*-nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut disarankan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Agusti, A. F. 2014. Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga. *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Arifin, I., dan Fitriyanti, D. 2014. Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Arifiyanti, Hermin., Payamta dan Sutaryo. 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- . 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 1 Tahun 2014. <http://www.bpk.go.id/ihips>.
- . 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester 2 Tahun 2014. <http://www.bpk.go.id/ihips>.
- Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sektor publik (2001-2008) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.V, No. 4. pp. 12- 30*. Universitas Indonesia.
- . 2011. Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform). *Dissertation*. The Australian National University.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan III*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. dan Ratmono, D. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Gutomo, Kotot. (2015, 25 Februari). Berburu Opini WTP.
<http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1910/Berburu-Opini-WTP.bpkp>
- Hilmi, A. Z., dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*: 1-77.
- Juweny, Siti. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 800-35 tahun 2016 tentang *Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2014 Tingkat Nasional*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Petunjuk Teknis Manual Evaluasi EKPPD*. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Pembentukan Daerah-Daerah otonom di Indonesia sampai dengan tahun 2014. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2010. *Pedoman Umum Good Public Governance*. Jakarta
- Laswad, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. pp. 101-121.
- Lin, Ming-lan, Lee, Yuan-Duen, Ho, Tsai-Neng. 2010. Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The Economic Performance of Local Government in China. *European Journal of Operational Research*. 209 (2011). 129-140.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1. Hal 1-17*.
- Martani, D., Fitriasari D., Annisa. 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)* , Volume 5 Oktober 2013, ISSN: 1858-2559 . Bandung
- Moon, M, Jae. 2002. The Evolution of E Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Admnistration Review*. July/Agust. Vo 62 (4): 424-433.
- Mustikarini, W. A., dan Fitriasari, D. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin. Universitas Indonesia
- Nurdin, Fandy. 2015. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

- Purba, Adearman. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. *Tesis*. USU. Medan
- Puspita, Rora., Dwi Martani. 2012. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada *Website* Pemda Tahun 2010. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Balikpapan,
- Rahmanurrasjid, A. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Ramandei, P. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Sari, A. P., Martani, D., Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Universitas Indonesia*.
- Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). *Jurnal Nominal 1* (1): 1-22.
- Sedyaningsih, P., Zaky, A. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). Universitas Brawijaya.
- Sekaran, Uma. .2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jilid 1. Edisi 4. Salemba Empat.
- Setyaningrum, D. 2015. Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Disertasi FE UI*. Depok.
- Simbolon, C.H. (2017, 29 mei). Evaluasi Auditor BPK. Media Indonesia. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/106578/evaluasi-auditor-bpk/2017-05-29>

- Sjoberg, Peter. (2003). Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001. *Lulea University of Technolgy*.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 Nomor 4, hal 1-13.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristic: Evidence From Indonesian Municipalities. *Penelitian Hibah Publikasi Internasional*. LP2M UNS.
- Tobirin. 2008. Penerapan Etika Moralitas dan Budaya Malu Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 2*: 16-21.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Vago. 2008. *Compliance-Does it Restrict Performance?* Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria.
- Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi 18 (1)*: 1-12.